

**TINGKAT KEMANDIRIAN, EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN PERTUMBUHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH: KAJIAN PADA PROVINSI JAWA BARAT*****INDEPENDENCE, EFFICIENCY, EFFECTIVENESS, AND GROWTH OF REGIONAL
ORIGINAL INCOME: A STUDY FROM WEST JAVA PROVINCE*****J. Marsudi, A. Supradi, F. Susandra**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda

E-mail: joko.marsudi@unida.ac.id, ari.supriadi@unida.ac.id, farizka.susandra@unida.ac.id**ABSTRACT**

Original Local Government Revenue is one source of income obtained through taxes, levies, local government-owned companies. Original Local Government Revenue is calculated based on the budget period and becomes a benchmark for the success of the Government in managing the regional economic resources. Independence, Efficiency and Effectiveness. The design of this study uses empirical studies. The population consists of 27 District / City Regional Governments in West Java Province. The sampling technique used purposive sampling, so that 26 districts / cities were chosen as the research sample. Data collection using library studies and settings. Testing and analyzing the data using multiple linear regression analysis using SPSS 25 program. The results of analysis and hypothesis testing conducted show that simultaneously the Independence, Efficiency and Effectiveness increases the Regional Original Income Fund, the partial variable of Independence is not in accordance with the Estimated Original Local Government Revenue, whereas Efficiency variables have a negative and significant effect on Original Local Government Revenue and Effectiveness variables have a positive and significant effect on Original Local Government Revenue. The amount calculated based on Budget, Performance, Independence, Efficiency and Effectiveness on Original Local Government Revenue is 39.4 percent.

Keywords: Independence, Efficiency, Effectiveness, Efficiency of Original Local Government Revenue.

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang didapat melalui pajak, retribusi, perusahaan milik pemerintah daerah. Pendapatan Asli daerah dihitung berdasarkan periode anggaran dan menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan Pemerintah dalam mengelola sumber-sumber ekonomi daerahnya. Penelitian ditujukan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Desain penelitian ini menggunakan study empiris. Populasi terdiri dari 27 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga terpilih 26 Kabupaten/Kota yang dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Pengujian dan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, secara parsial variabel Kemandirian tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Sedangkan variabel Efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan variabel Efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli. Besarnya kontribusi pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 39,4 persen.

Kata kunci: Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan Negara berkembang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik namun jika dilihat dari segi kesejahteraan masih banyak hal yang harus dibenahi agar peran Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat terpenuhi. Terpisahnya wilayah Indonesia menjadi hambatan bagi Pemerintah karena tidak setiap daerah dapat menikmati laju pembangunan infrastruktur yang merata, pembangunan hanya terfokus pada kepulauan Jawa, sementara daerah lain seperti kepulauan Sumatera, Kalimantan, Papua dan Maluku masih belum signifikan.

Adanya sistem otonomi daerah mendorong kemandirian bagi daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerahnya masing-masing (Muda Dan Hutapea, 2018). Keterlambatan pembangunan daerah yang disebabkan karena masih bergantungnya pemerintah daerah kepada dana bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat menyebabkan masalah baru dimana hal tersebut berimbas pada pembangunan SDM di setiap daerah, dimana angka pengangguran dan kemiskinan menjadi bukti rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga keuangan Swiss, yaitu Credit Suisse tahun 2017, Menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat ketimpangan terburuk di dunia, dengan prosentase kekayaan nasional (Miranti, 2017). Bila terus dibiarkan ini akan menjadi masalah yang cukup serius dalam sistem perekonomian dalam negeri.

Ketimpangan yang begitu tinggi disebabkan karena belum maksimal peran dari pemerintah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu adanya sebuah tolak ukur yang dapat menilai sebuah kinerja, agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Laporan keuangan menjadi salah satu alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-programnya, selain itu laporan keuangan dapat digunakan dalam mengevaluasi program yang telah dijalankan selama periode anggaran (Santoso dan Permata, 2018).

Rasio keuangan merupakan alat yang lebih sederhana untuk mengukur dan menyampaikan informasi penting kepada masyarakat tentang isi dari laporan keuangan. Ada banyak rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah kinerja namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Rasio kemandirian merupakan sebuah alat ukur untuk menilai tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana bantuan yang berasal dari pusat. Selain itu rasio kemandirian juga dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Rasio efisiensi merupakan alat ukur untuk menilai biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan daerah. Rasio efektivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan *output* dengan tujuan.

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah tertinggi setelah DKI Jakarta namun berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta yang telah mandiri dalam Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Masih mengandalkan dana perimbangan sebagai penyokong dalam pembangunan di setiap daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Sekertaris Daerah (SEKDA) Provinsi Jawa Barat Iwan Kurniawan "Saat ini Jawa Barat masih dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran dan kemiskinan selain itu pada Maret 2018 indeks gini rasio Jawa Barat, yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan, sebesar 0,407 naik dari 0,303 pada September 2017. Angka tersebut lebih tinggi dari gini rasio nasional. sebesar 0,389" (Hamid, 2018).

Hasil perhitungan yang didapat menyatakan bahwa rata-rata pertumbuhan

pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi. Selain itu beberapa daerah juga mengalami pertumbuhan pendapatan asli daerah yang negatif seperti yang terjadi pada Kabupaten Ciamis Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang dan Kota Banjar. Kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan setiap daerahnya, karena pendapatan asli daerah menjadi bagian untuk menutup kekurangan APBD. Selain itu pendapatan asli daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota (Sari dan Rotinsulu, 2019).

Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan semakin cepat pembangunan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kondisi tingkat kemandirian, Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Pengaruh tingkat efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan

Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui Pengaruh tingkat kemandirian, efisiensi dan efektivitas secara parsial terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, bagi lingkungan akademik, dan juga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Karena dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memahami tentang pengaruh Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan yang berkaitan dengan dapat dijadikan referensi yang bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Daerah.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kemandirian

Rasio kemandirian menurut Wachidah (2018) ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman". Formula yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya tingkat kemandirian Pemerintah Daerah menurut Arif dan Arza (2019) sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Kemandirian

Kemampuan Keuangan Daerah	Persentase PAD	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% – 25%	Instruktif
Rendah	26% – 50%	Konsultatif
Sedang	51% – 75%	Partisipatif
Tinggi	76% – 100%	Delegatif

Sumber: Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)

Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Formula yang digunakan

untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengukur hasil dari perhitungan formula diatas digunakan kriteria sebagai berikut (Salawati dkk,2019):

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentase	Keterangan
>100%	Kurang Efisien
100%	Efisien Berimbang
<100%	Efisien

Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Formula yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target PAD yang ditetapkan berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria dalam menentukan efektif atau tidaknya keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari besar atau kecilnya prosentase

yang didapat dari hasil perhitungan. Menurut Lestari dkk (2019) kriteria dalam menentukan efektif atau tidaknya keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai (x<100%) berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai (x=100%) berarti efektivitas berimbang
3. Jika diperoleh nilai (x>100%) berarti efektif

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Yulianti dan Wahyono, 2018). Sedangkan menurut Rahmayanti (2018) Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Formula untuk menghitung rasio pertumbuhan menurut Halim (2007:241), adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

- r : Rasio Pertumbuhan.
- Pn : Total PAD/ tahun ke-n.
- Po : Total PAD/B tahun sebelumnya.

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas secara simultan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah yang akan berdampak pada peningkatan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah (Arif dan Arza, 2019).

Pengaruh Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas Secara Parsial terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Yulianti dan Wahyono, 2018). Kontribusi terbesar dari pendapatan asli daerah berasal dari pajak dan retribusi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian dapat menaikkan pendapatan asli daerah.

Efisiensi adalah pencapaian output yang daerah yang tinggi dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan belanja daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran, sehingga

dapat menghemat anggaran dan menaikkan pendapatan asli daerah.

Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Rahmayanti

METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Tingkat Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini

Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Variabel *Independent* (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah Kemandirian (X_1), Efisiensi (X_2), dan Efektivitas (X_3). Variabel

(2018) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah.

dikategorikan study empiris, dengan teknik asosiatif kausal. Penggunaan

Teknik asosiatif kausal yaitu dengan menguji hipotesis hubungan variable sebanyak dua atau lebih yang mengandung sebab akibat dan biasanya diawali dengan kata pengaruh atau faktor determinan.

Dependent dalam penelitian ini adalah (variabel terikat) Pendapatan Asli Daerah. Indikator dari penelitian ini disajikan dalam tabel 3:

Tabel 3. Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Kemandirian (X_1)	Kemandirian menunjukkan kemampuan Perintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.	Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
Efisiensi (X_2)	Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi belanja dengan realisasi pendapatan yang diterima.	Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Efektivitas (X_3)	Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.	Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target PAD yang ditetapkan berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Pertumbuhan PAD (Y)	Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya.	Rasio Pertumbuhan = $\frac{P_n - P_0}{P_0}$	Rasio

Sumber : data diolah penulis

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah populasi 27 dan sampel yang di ambil 26 Kabupaten/Kota. Untuk pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2016), adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2016), adalah alat statistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang gambaran objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan secara umum atas objek yang diteliti tersebut.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mendasari penggunaan analisis regresi deskriptif. Model regresi deskriptif yang digunakan dalam pengujian ini harus terhindar dari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik tersebut. Asumsi-asumsi tersebut adalah:

- a. Uji Normalitas
- b. Uji Heteroskedastisitas
- c. Multikolinearitas
- d. Uji Auto Korelasi

3. Uji Regresi

Analisis Regresi Berganda analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2016).

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

a = Nilai Konstanta

X_1 = Kemandirian

X_2 = Efisiensi

X_3 = Efektivitas

ε = Error

β_1 = Koefisien regresi variabel X_1

β_2 = Koefisien regresi variabel X_2

β_3 = Koefisien regresi variabel X_3

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi berganda (*Multiple Regression*) dengan bantuan SPSS Versi 25 (*Statistical Program For Social Science*).

a. Uji Hopotesis (Uji-F)

Uji F digunakan untuk menguji regresi secara keseluruhan, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

b. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji regresi secara parsial atau sendiri-sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Kemandirian

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Hasil dari perhitungan yang dilakukan didapat bahwa tingkat kemandirian Kabupaten /Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat belum merata secara keseluruhan masih terdapat ketimpangan antara daerah. Secara keseluruhan tingkat kemandirian mengalami peningkatan dimana kemandirian tertinggi didapat oleh Kabupaten Bekasi dengan tingkat kemandirian 52,29% pada tahun 2013 dengan pola hubungan Partisipatif, lalu naik menjadi 65,13 % pada tahun 2014 dan mencapai tingkat kemandirian tertinggi pada tahun 2017

dengan presentase rasio kemandirian sebesar 86,24% dengan pola hubungan menjadi Delegatif. karena daerah tersebut merupakan pusat industri berskala besar di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk tingkat kemandirian terendah didapat oleh Kabupaten Tasikmalaya dengan tingkat kemandirian 3,29% pada tahun 2013 dengan pola hubungan instruktif dan mencapai rasio kemandirian tertinggi pada tahun 2017 dengan nilai 13,76%.

Analisis Tingkat Efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Tingkat efisiensi dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%, Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. Dalam tabel 4.3 terlihat bahwa dari 26 pemerintah daerah baik Kabupaten ataupun Kota di Provinsi Jawa Barat sudah dapat menekan anggaran belanjanya agar tidak melebihi pendapatan yang didapatnya. Pada perkembangannya ada 26 daerah Kabupaten/Kota yang masih berfluktuasi dalam tingkat efisiensinya, akan tetapi ada dua daerah yang memiliki tingkat efisiensi terbaik yaitu Kota Bogor dan Kota Sukabumi. Kedua daerah tersebut, memiliki tingkat efisiensi dibawah 100% yang artinya masuk kedalam kriteria efisien. Disamping itu terdapat kota dengan kriteria tidak efisien tertinggi dimana nilai rasio efisiensinya sebesar 167,15% pada tahun 2013 yaitu Kabupaten Ciamis.

Analisis Tingkat Efektivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Tingkat efektivitas di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir tidak ada Kabupaten/Kota yang dapat mempertahankan ketercapaian targetnya. Banyaknya daerah yang mendapat pendapatan

dibawah target yang telah di tetapkan pada anggaran akan menjadi masalah, karena akan berimbas pada penilaian kinerja keuangan yang buruk. Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat efektivitas yang rendah, hal itu dapat dilihat dari nilai efektivitas yang hanya mencapai 51,98% pada tahun 2015, 50,17% pada tahun 2016 dan 58,33% pada tahun 2017. Tingkat efektivitas tertinggi didapat oleh Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017 dengan nilai 190,31%. Sementara itu 14 daerah memiliki tingkat efektivitas yang stabil, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bogor dan Kota Depok, dimana 14 Daerah tersebut memiliki nilai efektivitas >100% dalam periode anggaran 2013 sampai dengan 2017.

Analisis Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Pendapatan asli daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat masih mengalami fluktuasi yang signifikan. Beberapa Kota mengalami pertumbuhan negatif pada periode anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017. Kabupaten Ciamis pada tahun 2015 sebesar -1,11%. Pada tahun 2016 Kabupaten Garut sebesar -8,08, Kabupaten Karawang pada tahun 2016 sebesar -5,04, Kota Banjar pada tahun 2016 sebesar -2,93 dan Kota Tasikmalaya sebesar -4,13 pada tahun 2015. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dimana total pertumbuhan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 118,88%.

yang digunakan dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Hasil dari analisis statistik deskriptif penelitian ini adalah sebagai berikut

Hasil Analisis

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data :

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

Variabel	N	Min	Max	Mean
Kemandirian	130	3,29	86,24	28,72
Efisiensi	130	88,48	167,15	98,84
Efektivitas	130	50,17	190,31	119,24
Valid N (listwise)	130	-8,08	118,88	28,50

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 25, 2019

Berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS yang telah disajikan, maka statistik deskriptif dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian

Hasil bahwa tingkat kemandirian di dibagi kedalam 4 kategori yaitu, rendah sekali dengan nilai 0%-25%, rendah dengan nilai 26%-50%, sedang dengan nilai 51%-75% dan tinggi dengan nilai 76%-100%. sementara hasil keseluruhan bila dirata-ratakan berada pada nilai 28,72% dan dapat dikategorikan cukup rendah.

2. Efisiensi

Berada pada tiga kriteria yaitu, efisien jika nilai <100%, efisiensi berimbang jika nilai =100, kurang efisien jika nilai >100%, sementara untuk nilai rata-ratanya sendiri berada pada kriteria efisien dengan nilai 88,48% >100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pada 26 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik.

3. Efektivitas

Berada pada tiga kriteria yaitu tidak efektif jika nilai <100%, efektivitas berimbang jika nilai =100%, dan efektif jika nilai >100%, sementara hasil dari nilai rata-rata menunjukkan 119,24% >100% dengan kriteria efektif. sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas untuk 26 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik.

4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Presentase variabel tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berkisar antara - 8,08% – 118,88% pada memiliki kriteria beragam mulai dari pertumbuhan yang mendapatkan hasil minus sampai dengan tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan. Sementara untuk nilai rata-rata didapat 28,50% masih cukup rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah belum merata untuk 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Analisa Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai

pertumbuhan pendapatan asli daerah, jika nilai dari Kemandirian, Efektivitas, dan Efisiensi dinaikan atau diturunkan nilainya. Berikut hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 7 :

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,575	25,243		,142	,888
	Kemandirian	-,103	,088	-,083	-1,178	,241
	Efisiensi	-,447	,225	-,139	-1,981	,048
	Efektivitas	,604	,072	,590	8,434	,000

a. Dependent Variable: Pertumbuhan

Sumber: Output pengolahan data dengan SPSS 25, 2019

Berdasarkan Tabel 5 Berikut adalah nilai persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 3,575 - 0,103X_1 - 0,441X_2 + 0,604X_3 + \varepsilon$$

Interpretasi dari regresi tersebut sebagai berikut :

1. Hasil persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta bernilai positif, yaitu sebesar 3,575. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa jika semua variabel bebas (independen) yang terdiri dari Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas diasumsikan bernilai 0, maka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah bertambah atau mengalami kenaikan sebesar 3,575.
2. Hasil persamaan regresi untuk variabel Kemandirian sebesar -0,103. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap penurunan Kemandirian sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Efisiensi dan Efektivitas bernilai 0, maka menyebabkan penurunan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,103. Koefisien menunjukkan tidak adanya hubungan antara Kemandirian dengan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.
3. Hasil persamaan regresi untuk variabel Efisiensi sebesar -0,441. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap penurunan Efisiensi sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Kemandirian dan

Efektivitas bernilai 0, maka menyebabkan meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,441. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara Efisiensi dengan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

4. Hasil persamaan regresi untuk variabel Efektivitas sebesar 0,604. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan Efektivitas sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Kemandirian dan Efisiensi Umum bernilai 0, maka menyebabkan meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,604. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan antara Efektivitas dengan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dalam menjelaskan variabel Belanja Daerah.. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 15:

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.628 ^a	.394	.380	1.92094

a. Predictors: (Constant), Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian

b. Dependent Variable: Pertumbuhan

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 25, 2019.

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa nilai R sebesar 0,628 yang menunjukkan bahwa nilai R (0,628) tersebut berada pada interval nilai R (0,60) – (0,80) dengan derajat hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat ini menggambarkan bahwa semakin baik tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi akan

menyebabkan peningkatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Nilai R Square/R² sebesar 0,39 atau 39,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi dari variabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variasi Kemandirian, Efektivitas dan Dana Efisiensi, sedangkan sisanya 60,6% (100% - 39,4%) dijelaskan oleh

pajak, retribusi, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah. Semakin besar nilai R Square akan semakin baik.

Pengujian Hipotesis Uji F-test

Hasil uji F dalam penelitian pengaruh tingkat kemandirian, efisiensi dan efektivitas

terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	30236,327	3	10078,776	27,313	.000 ^b
Residual	46494,475	126	369,004		
Total	76730,801	129			

Sumber: Output pengolahan data dengan SPSS 20, 2017

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai signifikansi untuk pengaruh Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi secara simultan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $27,313 > F$ tabel 2,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis H1 diterima berarti terdapat pengaruh Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi secara simultan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Barat. Hal

tersebut mengandung arti bahwa peningkatan dari semua variabel bebas akan diiringi dengan meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan nilai pengaruh sebesar 39,4 persen. Rendahnya pengaruh disebabkan karena dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisis pengaruh dari aspek kinerjanya saja, tidak dari sumber pendapatannya seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan dana perimbangan

Uji t-test

Hasil uji t dalam penelitian pengaruh tingkat kemandirian, efisiensi dan efektivitas terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,575	25,243		,142	,888
	Kemandirian	-,103	,088	-,083	-1,178	,241
	Efisiensi	-,447	,225	-,139	-1,981	,048
	Efektivitas	,604	,072	,590	8,434	,000

Sumber: Output pengolahan data dengan SPSS 25, 2019

1. Uji t Variabel Kemandirian

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai signifikansi untuk variabel Kemandirian terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar $0,241 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -1,178 > -1,978$,

sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh Kemandirian secara parsial terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Barat. Tidak adanya pengaruh menyebabkan variabel ini tidak dapat digunakan untuk menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengetahui variabel yang berpengaruh meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Tidak adanya pengaruh dari variabel Kemandirian disebabkan karena masih rendahnya tingkat kemandirian setiap daerah di Jawa Barat dengan nilai rata-rata hanya berkisar 28,50%.

2. Uji t Variabel Efisiensi

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh Efisiensi terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar $0,48 < 0,05$ dan nilai t hitung $-1,981 < -1,978$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif secara parsial Efisiensi terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pengaruh yang negatif menunjukan kebalikan, jika Efisiensi menurun maka akan menyebabkan peningkatan pada Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan begitupun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan yang diungkap oleh Miranti (2017) jika nilai rasio efisiensi lebih dari 100% maka daerah tersebut di kategorikan tidak efisien atau mengalami pemborosan dalam belanja daerahnya. Nilai rata-rata rasio efisiensi yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berkisar 98,84%, angka tersebut kurang dari 100% yang menunjukan daerah memiliki tingkat efisiensi yang baik.

3. Uji t Variabel Efektivitas

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh Efektivitas terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar $0,000 > 0,05$ dan nilai t hitung $8,434 > 1,978$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 tolak dan H_a diterima. Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif secara parsial Efektivitas terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukan adanya usaha dari Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya variabel Efektivitas akan menyebabkan meningkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, karena jika rasio 100% maka dapat dipastikan bahwa Pemerintah Daerah mendapatkan hasil yang melebihi target anggaran. Rasio efektivitas pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki nilai rata 119.24%.

Pembahasan

Uji F

Berdasarkan hasil uji F menunjukan bahwa Tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat sebesar 39,4%. Hal ini menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh sebesar 39,4% dan sisanya 60,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti pajak daerah dan retribusi daerah atau faktor-faktor lain diluar model.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, jika tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tinggi maka Pertumbuhan Pendapatan Daerah juga akan tinggi. Efektivitas dan Efisiensi menjadi faktor dimana pemerintah harus dapat memaksimalkan ketersediaan anggaran yang terbatas untuk mencapai target yang tertuang dalam anggaran, karena hal tersebut akan berdampak pada baik atau buruknya kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arif dan Arza (2019) yang menyatakan bahwa Kemandirian berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Mukmin dan Maemunah (2019) yang menyatakan bahwa Efektivitas dan Efisiensi berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji t

Pengaruh Kemandirian

Kusuma dan Hidayat (2018) menyatakan rasio kemandirian diukur dengan membandingkan realisasi PAD dengan bantuan dari Pemerintah Pusat selama periode 2013 sampai dengan 2017. Dari data yang

telah diolah menunjukkan hasil yang cukup kecil, dari nilai keseluruhan menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian hanya mencapai 28,72% dengan kriteria rendah dan pola hubungan konsultatif, artinya bahwa campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena pemerintah daerah dianggap sudah bisa menjalankan otonomi daerahnya namun dengan tingkat kemandirian yang masih rendah. Tingkat kemandirian yang rendah menunjukkan Pola Pembangunan yang masih mengandalkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat, ini akan berdampak pada pembangunan yang lambat dan memiliki banyak kelemahan, seperti yang terjadi pada Pemerintah Kota Bandung dimana mereka harus mangkas anggaran belanja daerahnya karena APBDP yang diajukan ditolak oleh Pemerintah Pusat (Mukmin dan Maemunah, 2019).

Hasil uji parsial variabel Kemandirian menyatakan bahwa, variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa kemandirian berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis ditolak disebabkan karena masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, membuat nilai rasio kemandirian kecil dan tidak berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah. Menurut Rahmayani (2018) PAD yang tinggi akan menciptakan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat kepada dana bantuan dari Pemerintah Pusat membuktikan bahwa Pemerintah Daerah belum mampu memaksimalkan potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Hamid (2018), yang menyatakan bahwa, masih rendahnya pendapatan asli daerah yang didapat oleh pemerintah disebabkan oleh kurangnya kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi pendapatan

Pengaruh Efektivitas

asli daerah (PAD), kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidaktimotivasi akan hasil yang mungkin dicapai (Miranti, 2017). Selain itu menurut Setiawan dan Tami (2018) pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang belum bisa memenuhi kebutuhan pada belanja operasional, akan berdampak pada pos belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang belum bisa terpenuhi dengan baik.

Pengaruh Efisiensi

Rasio Efisiensi yang diukur dengan membandingkan belanja daerah dengan pendapatan daerah secara keseluruhan selama periode anggaran 2013 sampai 2017 dengan sampel 26 Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mendapatkan hasil berfluktuasi, namun meski begitu tingkat rata-rata secara keseluruhan mendapatkan hasil yang efisien dengan nilai 98,84%. Hasil tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Muhammad Solihin, bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Jawa Barat sudah efisien (Miranti, 2017).

Hasil dari uji pengaruh yang dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda berkaitan dengan Efisiensi terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah didapat bahwa, variabel Efisiensi berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa bila nilai rasio efisiensi rendah maka akan menyebabkan meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut menunjukkan kesamaan dengan teori yang dikemukakan oleh Sari dkk (2019) dimana jika nilai rasio efisiensi lebih besar dari 100% maka dapat dikategorikan tidak efisien dan di jika nilai efisiensi kurang dari 100% maka dapat dikategorikan efisien. Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Arza (2019) yang menyatakan bahwa Efisiensi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Rasio efektivitas yang diukur dengan membandingkan target anggaran dengan realisasi secara keseluruhan selama periode 2013 sampai dengan 2017 pada 26 Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki efektivitas yang cukup baik, terlihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas yang didominasi oleh nilai lebih dari 100%. Selain itu pada tahun 2018 Pemerintah Jawa Barat mulai melakukan pembangunan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan capaian target pendapatan daerah. Pemerintah Jawa Barat telah meresmikan sebelas program yang akan di jalankan sebagai prioritas. Kesebelas program prioritas tersebut, adalah Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan, Akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan pedesaan, Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha, dan pariwisata, Peningkatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air. Peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Daya Saing Industri, Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan, Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana, Penanggulangan kemiskinan, Peningkatan penataan ruang daerah; dan Peningkatan kualitas kependudukan (Rahmayani, 2018)

Berdasarkan hasil uji secara parsial, dinyatakan bahwa variabel Efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya rasio efektivitas akan berdampak pada meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Pada dasarnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam skala makro dapat dijadikan sebagai sebuah tolak ukur dalam melihat perkembangan perekonomian di Jawa Barat, karena

penerimaan yang bersumber dari PAD secara konseptual berbasis pada pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan perkembangan suatu daerah (Setiawan dan Tami, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan kecocokan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma dan Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa Efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

SIMPULAN

1. Hasil dari uji pengaruh yang dilakukan menunjukan bahwa kemandirian tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, nilai signifikansi 0,241 lebih besar dari 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar -1,178 berada dalam wilayah tidak berpengaruh yaitu 1.978.
2. Hasil dari uji pengaruh menunjukan bahwa Efisiensi berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikansi 0,48 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar -1,981 berada di luar wilayah tidak berpengaruh yaitu antara -1.978 sampai dengan 1.978.
3. Hasil dari uji pengaruh menunjukan bahwa Efektivitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari pada 0,05 dan t_{hitung} 8,434 lebih besar dari t_{tabel} 1.978.
4. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tergolong kecil dengan nilai rata-rata 28,5%, itu disebabkan karena masih belum meratanya pembangunan di setiap wilayah. Selain itu beberapa wilayah mengalami pertumbuhan negatif seperti yang terjadi pada Kabupaten Garut tahun 2016 sebesar -8,08%, Kabupaten Karawang sebesar -5,04%, Kota Bajar sebesar -2,9

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., & Arza, F. I. (2019). **Analisis Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013–2017**. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 1(1), 35-49.
- Hamid, A. A. (2018). **Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka–Jawa Barat**. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 1(4).
- Kusuma, I. C., & Hidayat, H. (2018). **Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Slack Anggaran Dengan Penekanan Anggaran Dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Hotel Berbintang Di Kota Bogor)**. *JURNAL AKUNIDA*, 4(1), 35-44.
- Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2019). **Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24-33.
- Miranti, P. R. (2017). **Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015** (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Muda, I., & Hutapea, A. A. F. (2018). **Influence of capital expenditure and income original region to the income per capita in Indonesia**. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012065). IOP Publishing.
- Mukmin, M. N., & Maemunah, S. (2019). **Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi**. *Jurnal Akunida*, 4(2), 73-85.
- Rahmayani, M. W. (2018). **Analisis Tentang Kemandirian Pembangunan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013)**. *MAKSI*, 5(1).
- Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lopian, A. C. (2019). **Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah**. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2).
- Santoso, J., & Permata, S. (2018). **Analisis Laporan Keuangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada kabupaten/Kota Di Provinsijawa Tengah Tahun 2014-2016)** (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). **Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004–2014**. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 18(2).
- Setiawan, A. B., & Tami, R. P. (2018). **Pengaruh Penerapan SAP Dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderating**. *JURNAL AKUNIDA*, 4(1), 71-82.
- Sugiyono, 2016, **Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Akualitatif & RND**. Alfabeta Bandung
- Wachidah, A. L. (2018). **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015** (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Yuliyanto, A., & Wahyono, M. A. (2018). **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).